

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Akuntansi adalah proses seni dalam mencatat, menggolongkan, dan meringkas transaksi serta kejadian yang bersifat keuangan, dengan cara mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan, mencatat, menyajikan dalam bentuk angka, dan melaporkan aktivitas atau transaksi perusahaan menjadi informasi keuangan yang relevan (Kimmel et al., 2020). Proses ini bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan bagi pihak-pihak terkait (P. C. Ayuningtyas, 2023). Akuntansi memiliki peran penting dalam menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat dengan menjadi bagian dari sistem entitas yang berfungsi sebagai jalur informasi utama bagi pihak-pihak berkepentingan, di mana laporan keuangan berperan sebagai media komunikasi yang menghubungkan entitas dengan pihak internal maupun eksternal yang membutuhkan informasi tersebut (Cempaka & Harahap, 2024). Penerapan akuntansi bertujuan untuk menghasilkan suatu laporan yang dibutuhkan oleh pengguna internal maupun eksternal perusahaan berupa laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai kondisi perusahaan saat ini dan biasanya dibuat setiap periode akuntansi (Yulianis et al., 2021).

Setelah transaksi dicatat dan dirangkum, informasi tersebut disusun dalam bentuk laporan yang ditujukan untuk para pengguna. Laporan akuntansi menurut Nuha & Yulinartati merupakan suatu laporan yang berisi informasi ini dikenal

sebagai laporan keuangan yang merupakan salah satu wujud transparansi suatu entitas, di mana salah satu wujud transparansi suatu entitas tidak hanya memuat informasi terkait aspek keuangan, tetapi juga mencakup informasi lain yang berkaitan dengan sistem akuntansi (2024), seperti sumber daya ekonomi, kewajiban, dan berbagai hal lain yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (Saputri et al., 2022) . Laporan keuangan menjadi salah satu referensi utama dalam pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi keberlanjutan perusahaan di masa mendatang (Sinaga et al., 2022). Laporan keuangan yang dapat dikatakan jelas dan layak untuk dilaporkan kepada pihak-pihak berkepentingan adalah laporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, di mana pentingnya mengimplementasikan standar yang tepat memberikan arahan dalam penyajiannya (Widiastuti & Khoiriawati, 2022). Oleh karena itu, Penting bagi suatu perusahaan untuk memahami berbagai jenis standar akuntansi keuangan agar dapat menyusun laporan keuangan yang jelas dan akurat sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku, bukan menurut kehendak pribadi. Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi para *stakeholder* lokal atau internasional apabila tersedia tepat waktu, sehingga mereka tidak kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil (Fatimah & Artini, 2021).

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah standar yang menetapkan perlakuan akuntansi atas berbagai transaksi dan kejadian dalam proses penyusunan laporan keuangan (ANAS, 2023). SAK memiliki peran penting dalam menjamin transparansi, akurasi, dan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan, dengan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan

pengungkapan transaksi serta kejadian ekonomi. Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, berupaya mengadopsi standar ini untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menarik investasi asing. Indonesia telah menyelaraskan SAK dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan memenuhi standar internasional (Muslimah, 2024). Penerapan SAK yang jelas dan akurat bertujuan untuk memudahkan pembaca dan auditor dalam memahami setiap bagian laporan keuangan perusahaan serta meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya terhadap informasi keuangan yang disajikan (Perera & Chand, 2019).

Perkembangan standar akuntansi di Indonesia telah mengalami berbagai tahapan penting, Indonesia saat ini memiliki 4 macam standar akuntansi yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Standar Akuntansi Keuangan (SAK), SAK Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM), SAK ETAP menjadi SAK Entitas Privat (SAK EP) dan SAK SYARIAH (IAI Jawa Timur, 2024).

Salah satu jenis Standar Akuntansi Keuangan yang akan digantikan oleh SAK EP adalah SAK ETAP, dimana standar ini di distribusikan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2009 dan mendapat pengesahan dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 19 Mei 2009 (Fauziah & Reviandani, 2023). SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK. Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP, Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud

adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2016).

SAK ETAP adalah standar akuntansi yang bersifat independen dan tidak mengacu pada SAK, dengan sebagian besar penerapannya menggunakan konsep biaya historis. Standar ini dirancang untuk mengatur transaksi yang dilakukan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) melalui pendekatan yang lebih sederhana dalam perlakuan akuntansi dan relatif konsisten tanpa banyak perubahan selama beberapa tahun (Sinaga et al., 2022). Seiring dengan berkembangnya kebutuhan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan, DSAK IAI menilai bahwa SAK ETAP sudah tidak dapat mencakup keadaan perusahaan yang sebenarnya di masa sekarang. Beberapa ketentuan dalam SAK ETAP dianggap kurang relevan dengan kebutuhan informasi yang berkembang pesat, karena standar ini memberikan opsi pengungkapan yang lebih sederhana, sehingga tingkat transparansi laporan keuangan cenderung lebih rendah dan dapat mengurangi kualitas informasi yang tersedia bagi pengguna eksternal, seperti investor dan kreditor, yang ingin memahami kinerja dan posisi keuangan entitas secara lebih jelas.

SAK ETAP, yang awalnya diterbitkan untuk meningkatkan keterbukaan informasi laporan keuangan UMKM, mulai mengalami proses *review* komprehensif pada tahun 2014-2017 melalui kajian riset, hingga pada tahun 2017 mulai diterbitkannya *discussion paper* untuk merevisi standar tersebut (Abdallah & Maryanto, 2022). DSAK IAI menyetujui revisi SAK ETAP sesuai dengan IFRS for SMEs 2015 dengan dikeluarkannya *Draft* Eskposur SAK EP pada tanggal 29 Juli 2019 (2023), Sehingga pada 30 Juni 2021 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan Standar Akuntansi

Keuangan Entitas Privat (SAK EP) (Izzati & Nuraeni, 2022). SAK EP ini merupakan hasil adopsi dari *International Financial Reporting Standard for Small and Medium-Sized Entities*, yang telah disesuaikan dengan kondisi dan pertimbangan situasi di Indonesia. SAK EP akan menggantikan SAK ETAP dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, namun penerapan lebih awal diperbolehkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI), 2021). Diberlakukannya dan diterapkannya SAK EP, entitas yang sebelumnya menggunakan SAK ETAP maupun SAK EMKM harus beralih ke SAK EP dalam penyusunan laporan keuangan.

SAK EP ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) bagi pengguna eksternal (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI), 2021). Namun terdapat beberapa alasan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik untuk dapat menggunakan SAK EP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK EP dengan salah satunya jika : Instrumen utang atau ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik atau entitas sedang dalam proses menerbitkan instrumen tersebut untuk diperdagangkan dalam pasar publik seperti bursa efek domestik, bursa efek asing atau pasar over-the-counter, termasuk pasar lokal dan regional (Saputri et al., 2022).

Tujuan dari dilakukannya perubahan standar akuntansi dari SAK ETAP menjadi SAK EP ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan bagi entitas privat di Indonesia (Safiera, 2023). Penerapan SAK EP pada perusahaan

dapat memberikan beberapa struktur kebijakan akuntansi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan SAK ETAP. SAK EP memungkinkan untuk melakukan penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang tidak diatur dalam SAK ETAP, melainkan harus membuat laporan secara terpisah bagi entitas induk dan anak (DSAK IAI, 2024). SAK EP juga mencakup aturan mengenai pajak tangguhan, serta pembahasan aset dan liabilitas keuangan yang lebih mendalam dibandingkan SAK ETAP. SAK EP mempunyai perbedaan penggunaan jenis laporan dengan SAK ETAP, di mana SAK EP menggunakan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, dan laporan laba rugi termasuk rincian laba bersih dan unsur penghasilan komprehensif yang berbeda dengan SAK ETAP.

Perbedaan lain yang terdapat di dalam SAK ETAP adalah hanya memaparkan secara singkat mengenai keseimbangan antara biaya dan manfaat, sedangkan SAK EP menjelaskan lebih spesifik terkait konsep biaya atau usaha. SAK ETAP mengatur pengukuran investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama hanya menggunakan metode cost, sedangkan SAK EP dapat memberikan opsi lain dalam metode pencatatannya, yakni metode biaya (*cost*), nilai wajar (*fair value*), atau metode ekuitas (Syah & Irmawati, 2024). Selanjutnya pada SAK EP penyajian laporan arus kas dari aktivitas operasi dapat dilakukan dengan metode langsung maupun tidak langsung, sedangkan SAK ETAP hanya dapat melakukan penyajiannya secara tidak langsung.

Laporan keuangan diharapkan menjadi lebih informatif dan mudah dipahami oleh pihak eksternal dengan menggunakan SAK EP. SAK EP juga dirancang agar mudah diimplementasikan oleh entitas kecil dan menengah. Hal ini diharapkan dapat membantu entitas dalam menghasilkan laporan keuangan yang

lebih transparan tanpa harus menghadapi kompleksitas yang tidak perlu. Adopsi SAK EP memungkinkan entitas privat untuk lebih leluasa dalam menerapkan standar akuntansi yang relevan dengan kebutuhan mereka, tanpa mengorbankan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan. Adopsi SAK EP diharapkan memungkinkan entitas menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas serta relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan (Maulana & Marismiati, 2023). Penggunaan standar baru ini diharapkan lebih sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum secara internasional, sehingga entitas privat di Indonesia dapat lebih kompetitif di pasar global.

Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk melakukan analisis terkait implementasi SAK EP pada dua perusahaan di Surabaya Jawa timur. Berdasarkan pra *survey* terdapat dua perusahaan yang relevan untuk dijadikan objek dalam analisis penerapan SAK EP yaitu untuk objek penelitian pertama PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur (PWU JATIM) yang merupakan Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mulai beroperasi pada tahun 2000 (PT Panca Wira Usaha Jawa Timur, 2020). PT PWU Jatim yang bergerak di bidang jasa dan berfokus pada sektor *real estate* atau properti. Untuk objek penelitian kedua yaitu PT. Karet Ngagel Surabaya Wira Jatim yang merupakan Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bergerak di bidang manufaktur. PT. Karet Ngagel Surabaya Wira Jatim adalah pabrik Rubber Article yang sudah beroperasi sejak tahun 1920-an dengan produksi barang mentah untuk kebutuhan pabrik seperti *Rubber Fender*, *Rubber Hose*, *Rubber Sheet*, Karet Rekayasa, Karet Lining (*Rubber Lining*), dan *Rubber Belt Conveyor (Fabric & Steel Cord)*.

Adanya migrasi Standar Akuntansi Keuangan ini mendorong Peneliti untuk melakukan analisis terhadap dua perusahaan yang sedang melakukan perubahan penyusunan laporan keuangan yang awalnya menggunakan pencatatan laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) akan melakukan migrasi standar akuntansi untuk pencatatan laporan keuangannya dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).

Implementasi Standar Akuntansi Keuangan yang berbeda tentunya memiliki perbedaan juga terhadap cara penyajian atau pencatatan dalam laporan keuangan. Peralihan Standar Akuntansi Keuangan yang sedang dilakukan oleh dua perusahaan pengguna SAK EP ini, berpotensi menimbulkan beberapa perbedaan pencatatan dan perhitungan untuk beberapa akun dalam laporan keuangan Perusahaan. Laporan keuangan disusun oleh entitas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Namun, tidak semua ketentuan dalam SAK sejalan dengan aturan perpajakan. Pertama perhitungan pajak terutang harus mengikuti regulasi perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, rekonsiliasi fiskal diperlukan sebelum menyusun laporan keuangan untuk keperluan perpajakan (Pratiwi & Hidayati, 2020). Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian antara laba akuntansi dengan ketentuan perpajakan untuk memperoleh penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan peraturan pajak. Dalam rekonsiliasi fiskal, dapat timbul perbedaan yang berupa beda tetap atau beda waktu. Beda tetap adalah perbedaan yang terjadi pada penghasilan dan biaya yang tidak diakui oleh aturan perpajakan, baik untuk tahun pajak berjalan maupun tahun-tahun pajak berikutnya. Di sisi lain, beda waktu merupakan perbedaan pada penghasilan dan biaya yang

tidak diakui untuk tahun pajak berjalan, tetapi berpotensi diakui pada tahun pajak mendatang (Indriani & Priyadi, 2022). Di dalam SAK ETAP, pajak penghasilan badan diatur secara singkat (berdasarkan peraturan perpajakan), sedangkan SAK EP mengatur pajak tangguhan dan hal-hal terkait seperti prinsip pengakuan pajak tangguhan, dasar pengenaan pajak atas aset dan kewajiban, perbedaan temporer, pengukuran pajak tangguhan, pajak kini, pajak tangguhan dan beberapa akun lainnya.

Kedua selain dampak pada perpajakan, migrasi Standar Akuntansi Keuangan ini juga berpotensi memengaruhi perhitungan dan pencatatan dalam pengakuan imbalan kerja di laporan keuangan. Menurut PSAK 24 tentang Imbalan Kerja (Barek et al., 2021), imbalan kerja mencakup semua jenis kompensasi yang diberikan oleh entitas sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan oleh karyawan atau sebagai konsekuensi penghentian hubungan kerja. SAK EP mengadopsi ketentuan terkait imbalan kerja dari PSAK 24. Berdasarkan SAK EP, imbalan kerja yang diatur meliputi berbagai bentuk kompensasi kerja. Terdapat beberapa perbedaan akun dalam SAK EP seperti kewajiban imbalan kerja dan kewajiban imbalan pasca kerja, yang mencakup pesangon, pensiun, dan tunjangan lainnya, yang memerlukan pengakuan dan perhitungan yang berbeda dari SAK ETAP.

Ketiga terdapat beberapa perbedaan Pengukuran dan perhitungan aset sesuai dengan SAK Entitas Privat (SAK EP) Bab 17 aset tetap dan Bab 18 terkait aset tak berwujud yang mengatur pengakuan dan pengukuran biaya perolehan, termasuk revaluasi aset, untuk mencerminkan nilai wajarnya serta mengantisipasi risiko kredit melalui pencadangan kerugian.

Keempat terdapat Aturan perhitungan baru dalam SAK EP pada Bab 11 tentang instrumen keuangan dasar dan Bab 13 tentang persediaan diperlukan untuk meningkatkan keandalan dan relevansi laporan keuangan. Bab 11 memastikan bahwa piutang diukur dengan lebih akurat, termasuk pengakuan kerugian kredit ekspektasian agar mencerminkan risiko yang sebenarnya. Sementara itu, Bab 13 mengatur metode pengukuran persediaan agar sesuai dengan nilai yang dapat direalisasikan, menghindari overstatement atau understatement aset.

Melalui penelitian ini, diharapkan peneliti dapat melakukan analisis terkait beberapa indikator perubahan yang terjadi dalam penyajian laporan keuangan pada PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur (PT PWU Jatim) dan PT. Karet Ngagel Surabaya Wira Jatim untuk dapat memahami dampak peralihan ini pada aspek-aspek penting yang berpengaruh pada laporan keuangan entitas.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peralihan SAK ETAP menjadi SAK EP mempengaruhi perhitungan pajak dalam laporan keuangan PT Panca Wira Usaha Jawa Timur dan PT. Karet Ngagel Surabaya Wira Jatim?
2. Bagaimana peralihan SAK ETAP menjadi SAK EP mempengaruhi kewajiban imbalan kerja yang diakui dalam laporan keuangan PT Panca Wira Usaha Jawa Timur dan PT. Karet Ngagel Surabaya Wira Jatim?
3. Bagaimana peralihan SAK ETAP menjadi SAK EP mempengaruhi Pengukuran dan perhitungan aset dalam laporan keuangan PT Panca Wira Usaha Jawa Timur dan PT. Karet Ngagel Surabaya Wira Jatim?

4. Bagaimana peralihan SAK ETAP menjadi SAK EP mempengaruhi pencatatan piutang dan persediaan dalam laporan keuangan PT Panca Wira Usaha Jawa Timur dan PT. Karet Ngagel Surabaya Wira Jatim?
5. Apakah terdapat dampak lain yang ditimbulkan bagi PT Panca Wira Usaha Jawa Timur dan PT. Karet Ngagel Surabaya Wira Jatim dari adanya penyajian laporan keuangan menggunakan standar akuntansi keuangan yang baru?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis dan mengetahui dampak peralihan dari SAK ETAP ke SAK EP terhadap perhitungan dan pencatatan pajak.
2. Menganalisis dan mengetahui dampak peralihan dari SAK ETAP ke SAK EP terhadap akun-akun yang tercatat pada kewajiban imbalan kerja dan pasca kerja.
3. Menganalisis dan mengetahui dampak peralihan dari SAK ETAP ke SAK EP terhadap Pengukuran dan perhitungan aset.
4. Menganalisis dan mengetahui dampak peralihan dari SAK ETAP ke SAK EP terhadap piutang dan persediaan.
5. Mengidentifikasi dan mengetahui dampak apa saja yang timbul bagi PT Panca Wira Usaha Jawa Timur dan PT. Karet Ngagel Surabaya Wira Jatim akibat penerapan standar akuntansi keuangan yang baru (SAK EP) dalam penyajian laporan keuangannya.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

Manfaat secara teoritis

1. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap teori akuntansi, khususnya dalam pemahaman perbedaan antara SAK ETAP dan SAK EP (SAK EP) serta dampaknya pada penyajian laporan keuangan.

Manfaat secara praktis

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi entitas yang diteliti maupun beberapa perusahaan yang sedang dalam proses migrasi SAK untuk dapat memahami implikasi setelah adanya migrasi dari SAK ETAP ke SAK EP, yang dapat meningkatkan ketepatan penyajian laporan keuangan.